

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2003, pengelolaan keuangan negara masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan lama (peninggalan kolonial Belanda), yaitu *Indische Comptabiliteitswet (ICW)*, *Indische Bedrijvenwet (IBW)*, dan *Administratief Beheer (RAB)*. Kekosongan landasan hukum menjadikan lemahnya pengelolaan keuangan negara di Indonesia sehingga terjadi beberapa penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara (Dewan Perwakilan Rakyat, n.d.). Dalam rangka mengatasi hal tersebut maka pemerintah melakukan reformasi keuangan negara.

Pada tahun 2003, pemerintah melakukan reformasi keuangan negara yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya disebut UU 17/2003, sebagai langkah awal pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Kemudian, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut biasa disebut paket undang-undang keuangan negara (Paket UU KN).

Paket UU KN merupakan produk nasional yang menggantikan peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial. Dengan adanya paket UU KN menyebabkan perubahan pada sistem pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU 17/2003, Presiden harus menyampaikan kepada DPR rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tanggal 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh suatu komite standar yang independen yang selanjutnya dikenal dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). BPK harus memberikan pertimbangan terhadap KSAP sebelum ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 32 ayat (2) UU 17/2003, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya, peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010). Kemudian, dengan ditetapkannya PP 71/2010 tersebut maka setiap entitas harus segera mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara keseluruhan. Namun, bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh dapat menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) selama masa

peralihan. Pemerintah harus menerapkan SAP berbasis akrual selambat-lambatnya dalam pelaporan keuangan tahun anggaran 2015.

PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi tentang kondisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang digunakan untuk membuat dan mengevaluasi alokasi sumber daya oleh pengguna laporan keuangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Laporan keuangan wajib disampaikan oleh setiap entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual terdapat beberapa komponen laporan keuangan utama, salah satunya adalah laporan operasional. Laporan operasional menyajikan pos-pos yang meliputi pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang merupakan satuan kerja vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN Palembang merupakan salah satu KPPN A1 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. KPPN Palembang sebagai entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas APBN. Salah satu laporan keuangan yang harus disusun oleh KPPN Palembang adalah laporan operasional. Penyajian laporan operasional dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan tinjauan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan, khususnya penyusunan dan penyajian Laporan Operasional pada KPPN Palembang. Hasil tinjauan tersebut dituangkan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “Tinjauan atas Laporan Operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan penulis paparkan dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah penyajian laporan operasional pada KPPN Palembang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat?
2. Bagaimana kualitas pengungkapan pada laporan operasional KPPN Palembang?
3. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia selaku penyusun laporan keuangan pada KPPN Palembang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Meninjau kesesuaian penyajian laporan operasional pada KPPN Palembang dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
2. Mengetahui kualitas pengungkapan pada laporan operasional KPPN Palembang.

3. Mengetahui kompetensi sumber daya manusia selaku penyusun laporan keuangan pada KPPN Palembang.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan yaitu pada Laporan Operasional KPPN Palembang Tahun Anggaran 2020. Karya tulis ini menyajikan data dan fakta yang berkaitan dengan laporan operasional pada KPPN Palembang dan kemudian ditinjau kesesuaiannya terhadap peraturan yang berlaku. Peraturan yang akan digunakan penulis, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Karya tulis tugas akhir ini merupakan bentuk implementasi pengetahuan di bidang akuntansi pemerintah pusat khususnya mengenai penyusunan dan penyajian laporan operasional tingkat satuan kerja yang sudah didapatkan selama perkuliahan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai praktik akuntansi pemerintah pusat.

2. Bagi KPPN Palembang

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPPN Palembang terhadap penyusunan dan penyajian laporan operasional guna meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

3. Bagi Masyarakat Umum

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk memberikan informasi dan wawasan mengenai praktik akuntansi pemerintah pusat berupa penyusunan dan penyajian laporan keuangan, khususnya laporan operasional pada satuan kerja.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memperkenalkan mengenai gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas pada karya tulis tugas akhir ini. Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang masing-masing tertuang dalam subbab tersendiri.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan bagian yang menjelaskan mengenai teori atau ketentuan yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian terkait masalah yang dibahas. Teori-teori yang dibahas, antara lain definisi, struktur dan isi, dan format laporan operasional pemerintah pusat. Selanjutnya, penulis juga membahas teori terkait akuntansi pendapatan-LO, akuntansi beban, akuntansi surplus/defisit dari kegiatan non operasional, dan akuntansi pos luar biasa. Teori-teori tersebut digunakan untuk meninjau kesesuaiannya dengan penerapan pada laporan

operasional KPPN Palembang tahun 2020. Selain itu, teori mengenai kompetensi sumber daya manusia (SDM) sebagai landasan untuk mengetahui kompetensi SDM yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pada KPPN Palembang.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Metode dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data memuat metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data primer dan sekunder yang diperlukan untuk menyelesaikan karya tulis tugas akhir ini. Kemudian, gambaran umum objek penulisan menguraikan informasi tentang objek penulisan yang relevan berupa profil umum satuan kerja, struktur organisasi, dan uraian singkat tugas unit penyelenggara akuntansi dan pelaporan. Di samping itu, pembahasan hasil merupakan pembahasan inti yang dilakukan dengan meninjau kesesuaian antara laporan operasional KPPN Palembang tahun 2020 dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Simpulan merupakan bagian yang meliputi kesimpulan dari uraian mengenai tinjauan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan saran yang dapat penulis berikan untuk objek penulisan. Simpulan harus dapat menjawab rumusan masalah yang disusun sebelumnya. Selain itu, simpulan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penyusunan dan penyajian laporan operasional kedepannya.